

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi” yang akan dilaksanakan dengan mengambil data dari Kementerian Keuangan yaitu data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2010 – 2020.

#### **3.2 Metode Penelitian**

Metode penelitian dipakai guna memberikan gambaran kepada peneliti tentang langkah-langkah yang harus dilakukan peneliti, sehingga penelitian yang diteliti dapat terselesaikan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data dalam penelitian ini merupakan data runtut waktu (*time series*) dari tahun 2010 sampai dengan 2020.

##### **3.2.1 Operasionalisasi Variabel**

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasional variabel penelitian. Sesuai judul yang dipilih yaitu “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2010-2020” maka dalam hal ini penulis menggunakan variabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

No.	Variabel	Definisi Operasional	Skala	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi	Jumlah realiasasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi dalam kurun waktu satu tahun.	Rasio	Rupiah (Rp)
2.	Total Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi	Jumlah total Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi.	Rasio	Rupiah (Rp)
3.	Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi	Jumlah anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi dalam kurun waktu satu tahun.	Rasio	Rupiah (Rp)

### 3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu mempelajari, memahami, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada untuk mengetahui apa yang sudah ada dan apa yang belum ada dalam berbagai literasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### **3.2.2.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu (*time series*) yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain yang terdiri dari beberapa waktu periode, data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu. Pada penelitian ini data diperoleh dari *website* Kementerian Keuangan yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal>.

### **3.2.2.2 Prosedur Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan objek studi penelitian.

## **3.3 Model Penelitian**

Pada penelitian ini dilakukan beberapa model penelitian berupa model analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

## **3.4 Teknik Analisis Data**

### **3.4.1 Analisis Rasio Pertumbuhan PAD**

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dalam

beberapa periode (Halim, 2012 dalam Pramono, 2014:26). Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Rumus Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PADn} - \text{PADn} - 1}{\text{PADn} - 1}$$

Keterangan :

PADn = Pendapatan Asli Daerah Tahun n

PADn-1 = Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya

Dengan kriteria sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Klasifikasi Kriteria Laju Pertumbuhan**

Rasio Pertumbuhan (%)	Kriteria Pertumbuhan
85%-100%	Sangat Berhasil
70%-85%	Berhasil
55%-70%	Cukup Berhasil
30%-55%	Kurang Berhasil
< 30%	Tidak Berhasil

Sumber : Halim (2007:91)

Untuk selanjutnya penulis akan menghitung kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi tahun 2010-2020, dengan menggunakan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dapat mengetahui persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang nantinya dapat diketahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi berdasarkan rasio pertumbuhan.

### 3.4.2 Analisis Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah (Pramono, 2014:23). Pemerintah daerah dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, tetapi semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rumus Rasio Efektivitas Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah**

Kriteria Efektivitas	Rasio Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	<60%

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996

Untuk selanjutnya penulis akan menghitung kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi tahun 2010-2020, dengan menggunakan rasio efektivitas keuangan daerah untuk dapat mengetahui persentase efektivitas yang nantinya dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi berdasarkan rasio efektivitas.

### 3.4.3 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Halim (2012) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman. Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya rasio kemandirian. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996

- 1) Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang. mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Untuk selanjutnya penulis akan menghitung kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi tahun 2010-2020, dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah untuk dapat mengetahui persentase dan pola hubungan yang

nantinya dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.